

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Memasuki era reformasi, tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Sebagian besar di wilayah Indonesia, baik di provinsi maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggungjawaban kepala daerah masing – masing dengan lebih seksama. Hal tersebut karena beberapa kali terjadi pernyataan ketidakpuasan atas kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah (Zeyn, 2011). Pelaporan keuangan merupakan media komunikasi penting bagi organisasi sektor publik khususnya pemerintah.

Laporan keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi dalam suatu pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan pengelolaan keuangan secara baik dan sesuai dengan peraturan (Fatma, 2017).

Dengan adanya informasi dari laporan keuangan diharapkan dapat memberi prediksi di masa yang akan datang dan dapat mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus disajikan tepat waktu sehingga berguna bagi pengambilan keputusan.

Seiring perkembangan laporan keuangan daerah di Indonesia, maka kebutuhan akuntabilitas sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi kinerja kepada publik, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk pengelolaan keuangan daerah sendiri sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan. Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik pemerintah Indonesia melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Laporan pemerintah daerah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan di susun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/ DPRD dan masyarakat umum setelah dianut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Laba Rugi dan Catatan atas Laporan Keuangan (Nurillah, 2014).

Laporan pemerintah daerah tentunya dapat di analisis berdasarkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitasnya laporan keuangan pemerintah daerah yakni, kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern. Kualitas sumber daya manusia adalah elemen yang sangat penting dalam laporan keuangan

pemerintah daerah, jadi dapat dipastikan pengelolaan yang dilakukan dengan baik dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Afrianti, 2011).

Kurangnya kualitas sumber daya manusia dapat disebabkan karena di dalam melaksanakan pertanggung jawaban anggaran, banyak staf keuangan dalam OPD bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga dapat mempengaruhi hasil kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yakni sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan tindakan yang dilakukan pada keuangan dan non-keuangan untuk memastikan perlindungan atas asset, deteksi dan pencegahan penipuan, memenuhi persyaratan dan prosedur kebijakan internal control dana dari akurasi kelengkapan catatan (Abiola *et al.*, 2013). Tidak tercapainya pengendalian intern yang baik dapat menyebabkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah buruk.

Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang artinya apabila semakin baik kualitas SDM yang dimiliki oleh suatu OPD maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan (Trisnawati dan Wiratmaja, 2018). Dan didukung dengan penelitian dari Agum Gumelar (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Tetapi penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Ismi Desintha Putri *et al* (2017) yakni secara parsial kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti dan Harzita (2012) bahwa kualitas sumber daya manusia secara parsial berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Trisnawati dan Wiratmaja (2018) Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik system pengendalian intern yang dimiliki oleh suatu OPD maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Akan tetapi penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Budiawan *et al* (2014) yang menyatakan bahwa system pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern yang baik belum tentu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Trisnawati dan Wiratmaja (2018) yang menunjukkan bahwa: kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dengan menambah komitmen organisasi dan penerapan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel independen. Komitmen organisasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan pada organisasi tersebut, dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan

kepentingan pribadi. Menurut Rivaldy Manimprung, *et al* (2018) komitmen organisasi secara parsial dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasinya akan meningkatkan kinerja serta dedikasinya yang tinggi dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut dengan cara memaksimalkan kemampuan dalam dirinya yang dimiliki. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Nivo (2013) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Agum Gumelar (2017) Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas yang kemudian di identifikasikan kedalam rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk menguji dan menganalisis system pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk menguji dan menganalisis komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4. Untuk menguji dan menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi untuk berbagai pihak diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Aspek Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi sektor publik.

## 2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan sumber daya manusia dan sistem pengendalian internnya.